

## PENGARUH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, PERAN KOMITE, DAN INTEGRITAS SEKOLAH TERHADAP MUTU LULUSAN MELALUI MUTU PROSES

Erlina Rahmawati ✉, Kardoyo

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima :

September 2018

Disetujui :

September 2018

Dipublikasikan :

Oktober 2018

#### Keywords:

Financing Education, Graduate Quality, Learning Process Quality, Principal Leadership, School Commitee, School Integrity.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah, dan integritas sekolah terhadap mutu lulusan melalui mutu proses pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mutu proses berpengaruh terhadap mutu lulusan sebesar 36,42%. (2) Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap mutu lulusan, pembiayaan pendidikan berpengaruh mutu proses sebesar 10,11%, mutu proses memediasi penuh pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap mutu lulusan sebesar 19,1%. (3) Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap mutu lulusan sebesar 25,2%, kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap mutu proses sebesar 19,62%, mutu proses memediasi parsial pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu lulusan sebesar 51,9%. (4) Peran komite sekolah tidak berpengaruh terhadap mutu lulusan, peran komite sekolah berpengaruh terhadap mutu proses sebesar 7,78%, mutu proses tidak memediasi pengaruh peran komite sekolah terhadap mutu lulusan. (5) Integritas sekolah tidak berpengaruh terhadap mutu lulusan, integritas sekolah terhadap mutu proses sebesar 4,93%, mutu proses memediasi secara penuh pengaruh integritas sekolah terhadap mutu lulusan sebesar 13,7%.

### Abstract

*The purpose of this study is to determine effect of financing education, principal leadership, school committee, and school integrity to graduate quality through learning process quality. The analysis used is descriptive statistic and path. The results showed that (1) There's effect of the learning process quality to graduate quality by 36.42%. (2) There's no direct effects of financing education to graduate quality, there's effect of financing education to learning process quality by 10.11%, learning process quality is fully mediated effects of financing education to graduate quality with indirect effects by 19.1%. (3) There's effect of the principal leadership to the graduate quality by 25.2%, there's effect of principal leadership to learning process quality by 19.62%, learning process quality is partially mediate the effects of principal leadership to graduate quality by 51.9% (4) There's no direct effect of school committee to graduate quality, there's effect of school committee to learning process quality by 7.78%, learning process quality does not mediate the effect of school committee to graduate quality. (5) There's no direct effect of school integrity to graduate quality, there's effect of school integrity to learning process quality by 4.93%, learning process quality is fully mediated school integrity to graduate quality with indirect effects by 13.7%.*

© 2018 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung L1 Lantai 1 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: [erlinareal1403@gmail.com](mailto:erlinareal1403@gmail.com)

p-ISSN 2252-6544

e-ISSN 2502-356X

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya menyangkut bangsa dan negara. (UU No.20 Tahun 2003).

Pengukuran kualitas pendidikan dirilis oleh organisasi dunia salah satunya oleh UNESCO dalam *Education For All Global Monitoring Report* (EFA-GMR). Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua atau *The Education for All Development Index* (EDI) adalah indeks atau nilai yang menunjukkan kinerja pelaksanaan program pendidikan.

Pada tahun 2017 Indonesia menempati peringkat 108 di dunia dengan skor 0,603. Secara umum kualitas pendidikan Indonesia berada di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. Sementara itu ranking kualitas pendidikan Indonesia di Asia Tenggara menempati peringkat ke-5 dibawah Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan data peringkat tersebut Indonesia perlu banyak berbenah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Pendidikan yang bermutu tinggi merupakan ukuran keberhasilan pendidikan. Permasalahan mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan suatu sistem yang saling berpengaruh. Mutu lulusan suatu lembaga pendidikan dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Hoy dan Miskel (dalam Sugiyono, 2016: 157) memberikan indikator sekolah efektif yaitu adanya komponen *Input* (masukan), *Process* (proses), dan *Output* (keluaran).

Mutu berasal dari bahasa Latin, *qualis*, yang artinya *what kind of*. Mutu menurut Deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Mutu menurut Crosby ialah kesesuaian dengan yang disyaratkan. Perusahaan raksasa IBM mendefinisikan mutu ialah kepuasan pelanggan. Mutu sendiri dapat didefinisikan sebagai tingkat keunggulan. Secara umum mutu dapat diartikan

sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan Berdasarkan pendapat – pendapat tersebut maka mutu dapat diartikan produk dan atau jasa yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memuaskan pelanggan.

Penerapan definisi mutu dalam pendidikan dikemukakan Charles Hoy dalam *Improving Quality in Education*, menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah suatu evaluasi terhadap proses pendidikan dengan harapan tinggi untuk dicapai dan mengembangkan bakat- bakat para pelanggan pendidikan dalam proses pendidikan (Syafaruddin, 2004: 56). Pendapat tersebut sejalan oleh Achmad (1990) mengemukakan bahwa mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Mutu pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mutu lulusan suatu lembaga pendidikan dapat diukur dari pencapaian ujian nasional (UN). Departemen Pendidikan Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Peraturan Pemerintah (PP) pasal 3 No. 1 tahun 2005 menyebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya Ujian Nasional (UN) adalah untuk mengukur dan menilai kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi peserta didik.

Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang termasuk dalam lingkup BP2MK wilayah II Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini disajikan tabel perbandingan perolehan rata-rata nilai Ujian Nasional SMA Negeri selama 3 tahun terakhir:

**Tabel 1.** Perbandingan Rata-Rata UN SMA lingkup Nasional, Daerah, dan Kabupaten

RATA-RATA	2014/2015		2015/2016		2016/2017	
	IPA	IPS	IPA	IPS	IPA	IPS
<b>NASIONAL</b>	-	-	-	-	56,9	52,8
<b>JATENG</b>	60,5	57,9	58,4	57,1	57,3	55,4
<b>KUDUS</b>	64,1	60,0	64,0	61,4	59,0	55,1
<b>PATI</b>	60,2	59,1	61,6	59,2	56,0	51,7
<b>REMBANG</b>	57,6	52,9	56,2	55,1	58,2	54,2

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, diolah

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perolehan rata-rata nilai ujian nasional di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2014/2015 rata-rata Ujian Nasional SMA IPA sebesar 60,5 dan IPS sebesar 57,9. Tahun pelajaran 2015/2016 rata-rata Ujian Nasional SMA IPA turun menjadi 58,4 dan SMA IPS turun menjadi 57,1. Demikian halnya pada tahun 2016/2017 rata-rata Ujian Nasional SMA IPA turun menjadi 57,3 dan SMA IPS turun menjadi 55,4.

Kabupaten Kudus selama 3 tahun terakhir selalu memperoleh rata-rata nilai UN diatas rata-rata nilai UN provinsi. Kabupaten Pati juga cenderung memperoleh rata-rata nilai UN diatas rata-rata nilai UN provinsi meskipun pada tahun 2014 dan 2016 perolehan rata-rata nilai UN SMA IPA justru dibawah rata-rata UN provinsi. Sedangkan di Kabupaten Rembang cenderung memperoleh rata-rata UN berada dibawah rata-rata UN provinsi, kecuali pada tahun 2016/2017 perolehan rata-rata SMA IPA lebih tinggi.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membawahi BP2MK (Balai Pengendalian

Pendidikan Menengah dan Khusus) yang tersebar dalam 6 wilayah eks karesidenan. BP2MK bertugas membantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan teknis operasional dibidang pengendalian unit pelaksana satuan pendidikan. Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang merupakan kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Pati dengan Kabupaten Pati sebagai pusat pemerintahan eks karesidenan. Sebagai kabupaten dengan pusat pemerintahan BP2MK, Kabupaten Pati selayaknya mendapat perhatian lebih dibidang pendidikan dikarenakan adanya keberadaan BP2MK menjadi pengendali mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Data peringkat Ujian Nasional SMA Negeri di Jawa Tengah menempatkan Kabupaten Pati berada pada urutan dibawah Kabupaten Kudus sedangkan Kabupaten Rembang menempati peringkat dibawah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.** Perbandingan Perolehan Peringkat UN SMA Negeri di Kabupeten Kudus, Pati, dan Rembang

Kabupaten	Peringkat UN		
	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Kudus	9	2	17
Pati	25	11	27
Rembang	32	28	23

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, diolah

Dari tabel 1.2 tersebut dapat diketahui bahwa selain terjadinya kecenderungan penurunan rata-rata nilai ujian nasional sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1 ,

penurunan juga terjadi pada perolehan peringkat UN SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. Perolehan peringkat ujian nasional di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang sempat

mengalami kenaikan pada ujian nasional tahun 2015/2016. Kemudian pada tahun 2016/2017 peringkat ujian nasional SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang cenderung mengalami penurunan.

Terjadinya penurunan rata-rata dan peringkat UN tahun 2016/2017 baik di tingkat nasional maupun provinsi diklaim karena terjadinya peningkatan integritas sekolah dalam pelaksanaan UN. Kebijakan yang pernah digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada tahun 2015 yaitu meningkatkan kualitas pelaksanaan ujian nasional dengan meminimalisir kecurangan pelaksanaan UN, sehingga pada tahun 2015 diberlakukanlah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau *Computer Based Test* (CBT) tahun 2015. Saat itulah pertama kali pemerintah memberlakukan penilaian terhadap Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). IIUN tersebut dimaksudkan agar output hasil UN tidak hanya menilai hasil belajar siswa, tetapi juga menilai pelaksanaan ujian nasional tersebut.

Menurut Alawiyah (2015) IIUN merupakan tingkat persentase jawaban siswa yang tidak menunjukkan pola kecurangan. Kecurangan yang diukur adalah gabungan persentase kontekmenyontek antarsiswa (kecurangan antarindividu) dan persentase keseragaman pola jawaban soal UN (kecurangan sistemik/terorganisir) dalam suatu sekolah. Rentang angka indeks integritas adalah 0 -100 dimana semakin tinggi nilai indeks integritasnya maka menunjukkan tingkat kecurangan yang semakin rendah, begitupun sebaliknya. Hal tersebut diberitakan dalam website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa : “Hasil UN tahun 2016 menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian IIUN. Akan tetapi peningkatan rata-rata nilai IIUN tidak sejalan dengan perolehan rata-rata nilai UN yang justru menurun, perolehan IIUN justru berkorelasi negatif terhadap nilai UN”.

Integritas sekolah (*school integrity*) saat ini merupakan isu pendidikan yang krusial dan menjadi perhatian utama dalam pengembangan pendidikan. Budaya akademik di sekolah dan tingkat kecurangan akademik siswa menjadi tolok ukur apakah suatu sekolah memiliki integritas

yang baik atau tidak. Peningkatan integritas akademik harus dibangun karena akan berdampak besar pada integritas seseorang di masa yang akan datang. Demikian halnya dalam diri siswa, integritas akademik (*academic integrity*) yang tertanam dalam diri siswa maka akan membangun perilaku siswa yang bertanggung jawab, jujur, adil, memiliki rasa hormat, dan memiliki kepercayaan, yang merupakan wujud keberhasilan pendidikan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak pernah terlepas dari pembiayaan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa didukung biaya yang memadai pendidikan tidak akan berjalan sesuai harapan.

Menurut Matin (2014: 4) pembiayaan pendidikan adalah suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Mulyono (2010: 78) mengemukakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran yang digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Bastian (2007: 160) pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah proses analisis kebutuhan biaya pendidikan dan pengalokasian sumber-sumber dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung proses pendidikan.

Pentingnya biaya pendidikan dikemukakan R.L Johns, E.L Morphet, K. Alexander (dalam Fattah, 2009: 108) bahwa biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan, dan tenaga pendidik yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu faktor – faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar – mengajar. Demikian pula menurut Susan Berle, dan E. Sallis (dalam Fattah, 2009: 108) menyatakan bahwa biaya merupakan salah satu

di antara sekian banyak faktor penentu mutu pendidikan yang tidak dapat dihindarkan yang berfungsi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Mengingat begitu pentingnya pembiayaan pendidikan, maka pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan kualitas pendidikan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat 2 yaitu : “Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain pentingnya pembiayaan yang memadai, dalam peningkatan mutu pendidikan diperlukan pula adanya kualitas kepemimpinan yang baik untuk membangun kerjasama seluruh warga sekolah mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Beberapa ahli juga memiliki kesamaan pendapat yang menguatkan pentingnya kepemimpinan. Sheerens (dalam Sugiyono, 2016: 158) mengemukakan bahwa sekolah efektif memiliki kepemimpinan yang kuat, Mackenzie (dalam Sugiyono, 2016: 158) mengidentifikasi tiga pendidikan efektif dan kepemimpinan sekolah menjadi nomor urut pertama, sementara Edmons (dalam Sugiyono, 2016: 158) mengemukakan lima karakteristik sekolah efektif, salah satunya adalah kepemimpinan dan perhatian sekolah terhadap kualitas pengajaran.

Soetopo (1984:1) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari kelompok itu yaitu tujuan bersama. Kepemimpinan adalah setiap tindakan yang dilakukan individu atau kelompok untuk mengordinasi dan memberi arahan kepada individu atau kelompok yang lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Danim,2009: 205).

Dua kata kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Sedang sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Dengan demikian secara sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang yang diberi tugas

untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakannya proses pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam perannya sebagai pemimpin dalam mengkoordinasi, mengelola, dan mengarahkan warga sekolah demi kepentingan sekolah.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang menekankan pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepala sekolah memiliki otonomi yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan sekolahnya. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab pendidikan di sekolah bukan berarti bekerja sendiri dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, melainkan harus bekerjasama secara sinergi dengan seluruh warga sekolah.

Kepemimpinan kepala sekolah tidak dapat berjalan baik tanpa adanya dukungan dari pihak baik dari internal sekolah maupun eksternal sekolah. Dengan demikian peran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai realisasi dari peran serta masyarakat di bidang pendidikan diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat pendidikan.

Sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Akan tetapi pada kenyataannya komite sekolah seringkali belum memaksimalkan perannya. Komite Sekolah yang diharapkan menjadi perwakilan dari orang tua atau wali murid dan juga masyarakat yang peduli pendidikan, pada kenyataannya justru belum menjalankan perannya dengan baik. Hal tersebut dikemukakan Ratnaningtyas (2017) dalam *Economic Education Analysis Journal* mengemukakan bahwa : “Fenomena permasalahan dalam komite sekolah antara lain pembentukan komite yang dipandang sebagai formalitas semata, keberadaan komite belum berfungsi secara maksimal. Komite sekolah seolah-olah berfungsi sebagai stempel kebijakan-kebijakan kepala sekolah, dan adanya anggapan komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau yang bertugas mengumpulkan dana bantuan untuk pendidikan.”

Sementara itu penelitian yang dilakukan Balitbang Diknas RI menunjukkan bahwa peran komite belum maksimal dalam rangka mendukung perwujudan peningkatan kualitas lulusan, hal tersebut dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih rendah, yaitu rata-rata hanya 57,10%. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang sangat rendah itu ialah dalam hal menentukan kebijakan program sekolah dan mengawasinya, pertemuan rutin, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan iklim sekolah. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi ialah dalam mengawasi mutu sekolah, pertemuan BP3, pembayaran dan bentuk iuran BP3 per bulan serta sumbangan uang gedung untuk peserta didik baru.

Selain perlu dukungan komponen-komponen input pendidikan yang dijelaskan diatas meliputi pembiayaan, kepemimpinan

kepala sekolah, peran komite sekolah, dan integritas sekolah yang berkualitas, proses pembelajaran yang berkualitas juga memegang peran penting. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Mutu proses berkaitan dengan pengembangan proses belajar mengajar. Pendidikan dikatakan baik jika mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dan mampu membantu siswa belajar, sehingga mencapai hasil belajar yang diharapkan. Keberhasilan suatu proses pembelajaran menjadi tolok ukur mutu proses yang baik.

Demikian kompleksnya pendidikan, maka sangat penting untuk membangun seluruh komponen pendidikan mulai dari input, proses, hingga menghasilkan output atau lulusan yang bermutu. Maka atas dasar latar belakang diatas penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Peran Komite Sekolah, dan Integritas Sekolah terhadap Mutu Lulusan Melalui Mutu Proses Pembelajaran SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang.”**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah untuk dicari penyelesaiannya :

(1) UNESCO dalam *Education For All Global Monitoring Report* (EFA-GMR) melansir kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat 108 di dunia. Peringkat kualitas pendidikan Indonesia di Asia Tenggara menempati peringkat ke-5 dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

(2) Terjadinya penurunan rata-rata nilai Ujian Nasional SMA dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2014 hingga tahun 2017 baik dalam skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penurunan lebih besar terjadi pada sekolah dengan penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) atau *Computer Based Test* (CBT). (3) Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) berkorelasi negatif terhadap perolehan nilai Ujian Nasional SMA. (4) Besarnya pembiayaan pendidikan di sekolah belum mampu meningkatkan kualitas lulusan. (5) Kurangnya kontribusi dan peran komite sekolah dalam

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih rendah, yaitu rata-rata hanya 57,1%. (6) Berbagai kasus pelanggaran kepala sekolah disebabkan kurangnya pengawasan dan budaya akademik sekolah yang cenderung rendah.

Tujuan penelitian ini diantaranya : (1) Mengetahui pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap mutu lulusan SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. (2) Mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu lulusan SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. (3) Mengetahui pengaruh peran komite sekolah terhadap mutu lulusan SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. (4) Mengetahui pengaruh integritas sekolah terhadap mutu lulusan SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang.

(5) Mengetahui pengaruh mutu proses pembelajaran terhadap mutu lulusan SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. (6) Mengetahui pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap mutu proses pembelajaran pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. (7) Mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu proses pembelajaran pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. (8) Mengetahui pengaruh peran komite sekolah terhadap mutu proses pembelajaran pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. (9) Mengetahui pengaruh integritas sekolah terhadap mutu proses pembelajaran pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. (10) Mengetahui pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap mutu lulusan melalui proses pembelajaran pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. (11) Mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu lulusan melalui proses pembelajaran pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. (12) Mengetahui pengaruh peran komite sekolah terhadap mutu lulusan melalui proses pembelajaran pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang. (13) Mengetahui pengaruh integritas sekolah terhadap mutu lulusan melalui proses

pembelajaran pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang.

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, karena pengujian variabel yang akan dilakukan menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan angka dan analisis data yang dipakai menggunakan prosedur statistik dengan bantuan SPSS. Selain itu, penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kausalitas (sebab-akibat), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel, dan bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kausalitas (sebab-akibat).

Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang sebanyak 24 sekolah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi. Teknik sampling jenuh digunakan apabila populasi yang ada kurang dari 30. Variabel penelitian ini adalah variabel *dependen* (terikat) yaitu mutu lulusan (Y), variabel *independen* (bebas) yaitu pembiayaan pendidikan (X1), kepemimpinan kepala sekolah (X2), peran komite sekolah (X3) dan integritas sekolah (X4), dan variabel mediasi yaitu mutu proses pembelajaran (M).

Teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, observasi, wawancara, dan angket atau kuesioner. Metode studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Studi dokumentasi biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dokumen dapat berupa sumber tertulis, gambar (foto), film, dan karya-karya monumental yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam penelitian ini studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data terkait pembiayaan sekolah

yaitu data Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2017/2018 dan data nilai Ujian Nasional tahun 2017/2018 pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang.

Angket (kuesioner) dalam penelitian ini merupakan angket (kuesioner) tertutup dengan teknik *interview guide* berupa pernyataan atau pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai variabel penelitian. Sehingga responden hanya memilih jawaban dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. Angket dibuat dengan menggunakan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2016:93), skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Menggunakan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Teknik analisis uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji validitas variabel penelitian dalam penelitian ini menunjukkan valid. Sedangkan

hasil uji reliabilitas variabel penelitian menunjukkan reliabel dengan nilai *cornbach's alpha* > 0,70. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial meliputi ; uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, dan uji sobel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik masing-masing indikator dalam setiap variabel agar lebih mudah memahami pengukuran pada variabel yang diungkap. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel pembiayaan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah, dan integritas sekolah.

### Deskripsi Variabel Mutu Lulusan

Data mutu lulusan diperoleh melalui studi dokumentasi nilai Ujian Nasional SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang tahun 2017/2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 3.** Deskripsi Variabel Mutu Lulusan

Interval	Frek.	Persentase	Kriteria
72 – 77	2	8%	Sangat Tinggi
66 – 71	4	17%	Tinggi
60 – 65	6	25%	Sedang
54 – 59	4	17%	Rendah
< 54	8	33%	Sangat Rendah
Jumlah	24	100%	Sedang

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang sebanyak 8% kriteria mutu lulusan sangat tinggi, 17% kriteria mutu lulusan tinggi, 25% kriteria mutu lulusan sedang, 17% kriteria mutu lulusan rendah, dan 33% kriteria mutu lulusan sangat rendah. Sedangkan nilai rata-rata mutu lulusan SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang tahun 2017/2018 adalah sebesar 59,58 dan termasuk dalam kriteria sedang.

### Deskripsi Variabel Pembiayaan Pendidikan

Data pembiayaan pendidikan diperoleh melalui studi dokumentasi berupa total sumber dan pengeluaran pendidikan yang mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada SMA Negeri Se-Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang.

**Tabel 4.** Deskripsi Variabel Pembiayaan Pendidikan

	<b>Maximum</b>	<b>Minimum</b>	<b>Mean</b>
<b>Biaya</b>	8.343.942	2.086.116	4.304.399

(dalam ribuan Rupiah)

Berdasarkan hasil deskriptif statistik pada tabel 4 dapat diketahui bahwa SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang memiliki biaya pendidikan tertinggi sebesar Rp. 8.343.942.000 dan nilai terendah sebesar Rp. 2.086.116.000 dan nilai rata-rata untuk variabel biaya pendidikan adalah Rp. 4.304.398.500.

Aspek pembiayaan pendidikan meliputi sumber dan pengeluaran yang dirinci kedalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Berdasarkan pada hasil dokumentasi penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum sumber dana sekolah terbagi kedalam beberapa pos pendapatan yaitu : BOS (Pusat), BOP (Daerah), PSM (Partisipasi Sumbangan Masyarakat), dan pendapatan lain.

Menurut Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 bahwasannya sasaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah bagi SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun untuk besaran jumlah dana BOS diterima / satuan biaya BOS yang diterima oleh SMA Negeri dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan yaitu sebesar Rp. 1.400.000/peserta didik/tahun.

Sejak tahun 2017 dilakukan alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Sehingga terkait dengan pendanaan pun menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terhitung mulai 1 Januari 2018 telah mengucurkan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk SMA/SMK, dan Sekolah Luar Biasa.

Besarnya nominal anggaran untuk BOP SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa se- Jawa Tengah tersebut adalah sebesar Rp. 792 Milyar

yang dipergunakan untuk pembiayaan honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) serta operasional sekolah. Besarnya dana BOP yang diterima oleh SMA Negeri dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 adalah kisaran Rp. 198.000/peserta didik/tahun. Adapun jumlah siswa yang menerima yang disesuaikan pada *database* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada September 2017. Selain BOP Pendidikan untuk siswa, tiap sekolah juga memperoleh BOP Pendidikan untuk Honor Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) dengan nominal anggaran yang berbeda di masing-masing sekolah.

Dengan diterimanya dana BOP dari Pemerintah Provinsi maka sekolah dapat menekan biaya PSM (Partisipasi Sumbangan Masyarakat). Sebelumnya dana PSM yang dibayar rutin oleh orang tua peserta didik digunakan untuk anggaran honorarium GTT dan PTT yang jumlahnya cukup besar. Kini honorarium GTT dan PTT di sekolah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi, sehingga dana PSM (Partisipasi Masyarakat) dapat ditekan, dengan demikian maka peserta didik dapat membayar biaya PSM/SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

Sekolah di wilayah pusat kota cenderung memiliki sumber dana yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah di wilayah kecamatan. Hal tersebut dikarenakan jumlah peserta didik yang lebih banyak, dan dipengaruhi juga oleh status ekonomi mayoritas peserta didik sekolah di pusat kota yang cenderung lebih tinggi. Sekolah dengan status ekonomi mayoritas peserta didik yang tinggi mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada sekolah melalui iuran-iuran. Sehingga sekolah menerima bantuan dari dana PSM dalam jumlah yang lebih besar.

Komponen pengeluaran / belanja sekolah terbagi atas beberapa pos pengeluaran yaitu :

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Jenis pengeluaran dalam belanja pegawai antara lain adalah honorarium PNS, honorarium Non-PNS (GTT dan PTT), upah lembur dan lain-lain.

Besarnya honorarium untuk guru tidak tetap (GTT) di SMA Negeri yaitu sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah 10% dengan ketentuan GTT linear dengan minimal jam mengajar 24 jam pelajaran dalam seminggu. Apabila GTT mengajar kurang dari 24 jam maka perhitungannya adalah UMK Kabupaten/Kota dibagi 24 dikalikan dengan jumlah jam mengajar GTT yang bersangkutan.

Sedangkan besarnya honorarium untuk pegawai tidak tetap (PTT) adalah sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah 7,5% adalah untuk PTT S1, 5% untuk PTT D3, dan 2,5% untuk PTT SMA/SMK/Sederajat, dan 0% untuk PTT SD.

**Deskripsi Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah**

Data penelitian pada variabel kepemimpinan kepala sekolah diperoleh melalui angket atau kuesioner, dengan hasil deskripsi variabel sebagai berikut :

**Tabel 5.** Deskripsi Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah

Interval	Frek.	Persentase	Kriteria
114 – 135	24	100%	Sangat Baik
92 – 113	0	0%	Baik
70 – 91	0	0%	Cukup Baik
48 – 69	0	0%	Kurang Baik
26 – 47	0	0%	Tidak Baik
Jumlah	24	100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang sebanyak 100% memiliki kepemimpinan kepala sekolah ber kriteria sangat baik. Nilai rata-rata kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan

Rembang adalah sebesar 125,5 sehingga termasuk dalam kriteria sangat baik.

**Deskripsi Variabel Peran Komite Sekolah**

Data penelitian pada variabel peran komite sekolah diperoleh melalui angket atau kuesioner, dengan hasil deskripsi variabel sebagai berikut :

**Tabel 6.** Deskripsi Variabel Peran Komite Sekolah

Interval	Frek.	Persentase	Kriteria
47 – 55	3	12%	Sangat Tinggi
38 – 46	21	88%	Tinggi
29 – 37	0	0%	Sedang
20 – 28	0	0%	Rendah
< 20	0	0%	Sangat Rendah
Jumlah	24	100%	Tinggi

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang sebesar 12% peran komite sekolah memiliki kriteria sangat tinggi, dan 88% memiliki kriteria tinggi. Nilai rata-rata peran komite sekolah pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan

Rembang tahun 2017/2018 adalah sebesar 41,96 sehingga termasuk dalam kriteria tinggi.

### Deskripsi Variabel Integritas Sekolah

Data penelitian pada variabel integritas sekolah diperoleh melalui angket atau kuesioner, dengan hasil deskripsi variabel sebagai berikut:

**Tabel 7.** Deskripsi Variabel Integritas Sekolah

Interval	Frek.	Persentase	Kriteria
169 - 200	17	71%	Sangat Baik
137 - 168	7	29%	Baik
105 - 136	0	0%	Cukup Baik
73 - 104	0	0%	Kurang Baik
< 73	0	0%	Tidak Baik
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang sebesar 71% sekolah memiliki integritas berkriteria sangat baik, dan 29% sekolah memiliki integritas berkriteria baik. Nilai rata-rata integritas sekolah pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang tahun 2017/2018 adalah

sebesar 1171,96 sehingga termasuk dalam kriteria sangat baik.

### Deskripsi Variabel Mutu Proses Pembelajaran

Data penelitian pada variabel mutu proses pembelajaran diperoleh melalui angket atau kuesioner, dengan hasil deskripsi variabel sebagai berikut :

**Tabel 8.** Deskripsi Variabel Mutu Proses Pembelajaran

Interval	Frek.	Persentase	Kriteria
127 - 150	18	75%	Sangat Baik
103 - 126	6	25%	Baik
79 - 102	0	0%	Cukup Baik
55 - 78	0	0%	Kurang Baik
< 54	0	0%	Tidak Baik
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang sebesar 75% sekolah memiliki mutu proses pembelajaran berkriteria sangat baik, dan 25% sekolah memiliki mutu proses pembelajaran berkriteria baik. Nilai rata-rata mutu proses pembelajaran pada SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang tahun 2017/2018 adalah sebesar 1133,83 sehingga termasuk dalam kriteria sangat baik.

### Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur (*path analysis*) merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel mediasi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis jalur dilakukan menggunakan program IBM SPSS v21 dengan 2 tahap persamaan regresi. Persamaan regresi pertama yaitu untuk menguji pengaruh pembiayaan pendidikan (X1), kepemimpinan kepala sekolah (X2), peran komite sekolah (X3), dan integritas sekolah (X4) terhadap mutu lulusan (Y). Sementara persamaan regresi kedua yaitu untuk menguji pengaruh pembiayaan pendidikan (X1), kepemimpinan kepala sekolah (X2), peran komite sekolah (X3), dan integritas sekolah (X4) terhadap mutu proses (M). Analisis jalur yang dilakukan diperoleh persamaan regresi dengan nilai koefisien regresi sebagai berikut :

**Tabel 9.** Hasil Uji Regresi dengan Mutu Lulusan Sebagai Variabel Dependen

Variabel	Std.Error	Stand Coefficients Beta	t hitung	Sig.	R Square	Adj. R Square
Biaya (X1)	0,000	-0,176	-1,443	0,166	0,889	0,858
Kepala Sekolah (X2)	0,179	0,502	3,572	0,002		
Komite Sekolah (X3)	0,177	0,032	0,326	0,748		
Integritas (X4)	0,077	0,006	0,060	0,953		
Mutu Proses (M)	0,184	0,602	3,024	0,007		

Berdasarkan tabel 9 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -0,176 X_1 + 0,502 X_2 + 0,032 X_3 + 0,006 X_4 + 0,602 X_5 + 0,333$$

Nilai 0,333 merupakan  $e_1$ , yaitu nilai residual eror variabel mutu lulusan yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian. Hal ini menjelaskan bahwa sebesar 33% variabel

mutu lulusan (Y) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan nilai koefisien pada kolom *Standardized Coefficients Beta*, karena nilai satuan yang digunakan antar variabel berbeda, sehingga perlu untuk disamakan. Dengan demikian maka dalam persamaan regresi tidak menggunakan nilai *Constanta*.

**Tabel 10.** Hasil Uji Regresi dengan Mutu Proses sebagai Variabel Dependen

Variabel	Std.Error	Stand Coefficients Beta	t hitung	Sig.	R Square	Adj. R Square
Biaya (X1)	0,000	0,318	2,650	0,016	0,844	0,811
Kepala Sekolah (X2)	0,174	0,443	3,509	0,002		
Komite Sekolah (X3)	0,183	0,279	2,947	0,008		
Integritas (X4)	0,086	0,222	2,155	0,044		

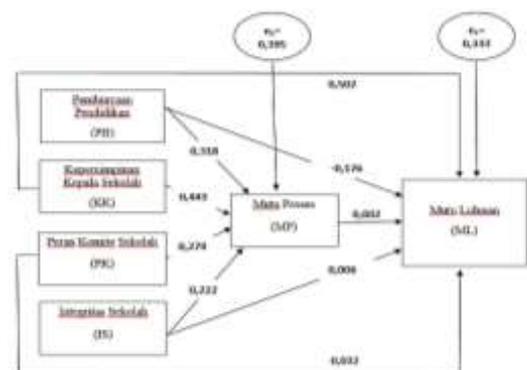
Berdasarkan tabel 10 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$M = 0,318 X_1 + 0,443 X_2 + 0,279 X_3 + 0,222 X_4 + 0,395$$

Nilai sebesar 0,395 merupakan  $e_2$ , yaitu nilai residual eror variabel mutu proses yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian. Hal ini menjelaskan bahwa sebesar 39,5% variabel mutu proses (M) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan nilai koefisien pada kolom *Standardized Coefficients Beta*, karena nilai satuan yang digunakan antar variabel berbeda, sehingga perlu untuk disamakan. Dengan demikian maka dalam persamaan regresi tidak

menggunakan nilai *Constanta*. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan maka diperoleh model analisis jalur sebagai berikut :



**Gambar 1.** Hasil Model Analisis Jalur

**Uji Hipotesis**

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan

variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Hasil uji t variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11.** Hasil Uji Hipotesis (Uji t) dengan Mutu Lulusan sebagai Variabel Dependen

H	Variabel	Koefisien	Sig.	Keputusan
H <sub>1</sub>	Pembiayaan Pendidikan	-0,176	0,166	Ditolak
H <sub>2</sub>	Kepemimpinan Kepala Sekolah	0,502	0,002	Diterima
H <sub>3</sub>	Peran Komite Sekolah	0,032	0,748	Ditolak
H <sub>4</sub>	Integritas Sekolah	0,006	0,953	Ditolak
H <sub>5</sub>	Mutu Proses	0,602	0,007	Diterima

**Tabel 12.** Hasil Uji Hipotesis (Uji t) dengan Mutu Proses sebagai Variabel Dependen

H	Variabel	Koefisien	Sig.	Keputusan
H <sub>6</sub>	Pembiayaan Pendidikan	0,318	0,016	Diterima
H <sub>7</sub>	Kepemimpinan Kepala Sekolah	0,443	0,002	Diterima
H <sub>8</sub>	Peran Komite Sekolah	0,279	0,008	Diterima
H <sub>9</sub>	Integritas Sekolah	0,222	0,044	Diterima

**Uji Sobel**

Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Uji sobel dapat dilakukan dengan perhitungan melalui aplikasi sobel test *Calculator for Significance* di [www.danielsoper.com](http://www.danielsoper.com). Berikut ini langkah perhitungannya :

**Pengaruh Pembiayaan Pendidikan (X1) terhadap Mutu Lulusan (Y) melalui Mutu Proses (M)**

Pembiayaan pendidikan tidak berpengaruh langsung terhadap mutu lulusan. Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung tidak langsung pembiayaan pendidikan terhadap mutu lulusan melalui mutu proses adalah sebesar  $(0,318) \times (0,602) = 0,191 = 19,1\%$ . Sehingga total pengaruh adalah sebesar 19,1%.

Hasil perhitungan uji sobel menggunakan Sobel Test diperoleh nilai *sobel tes statistic* (t hitung) sebesar 3,27173911 nilai tersebut lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,97.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu proses (M) memediasi secara penuh pengaruh pembiayaan pendidikan (X1) terhadap mutu

lulusan (Y). Dengan demikian maka H<sub>10</sub> yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap mutu lulusan melalui mutu proses SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang **diterima**.

**Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2) terhadap Mutu Lulusan (Y) melalui Mutu Proses (M)**

Besarnya pengaruh langsung kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu lulusan sebesar 25,2%. Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu lulusan melalui mutu proses adalah sebesar  $(0,443) \times (0,602) = 0,267 = 26,7\%$ . Sehingga total pengaruh adalah sebesar 51,95%.

Hasil perhitungan uji sobel menggunakan Sobel Test diperoleh nilai *sobel tes statistic* (t hitung) sebesar 2,00928831 nilai tersebut lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,97. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu proses (M) memediasi secara parsial pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X2) terhadap mutu lulusan (Y). Dengan demikian maka H<sub>11</sub> yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh

kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu lulusan melalui mutu proses SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang **diterima**.

#### **Pengaruh Peran Komite Sekolah (X3) terhadap Mutu Lulusan (Y) melalui Mutu Proses (M)**

Komite sekolah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap mutu lulusan. Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung peran komite sekolah terhadap mutu lulusan melalui mutu proses adalah sebesar  $(0,279) \times (0,602) = 0,168 = 16,8\%$ . Sehingga total pengaruh adalah sebesar 16,8%.

Hasil perhitungan uji sobel menggunakan Sobel Test diperoleh nilai *sobel tes statistic* (t hitung) sebesar 1,38191725 nilai tersebut lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar 1,97. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu proses (M) tidak memediasi pengaruh peran komite sekolah (X3) terhadap mutu lulusan (Y). Dengan demikian maka  $H_{12}$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh peran komite sekolah terhadap mutu lulusan melalui mutu proses SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang **ditolak**.

#### **Pengaruh Integritas Sekolah (X4) terhadap Mutu Lulusan (Y) melalui Mutu Proses (M)**

Integritas sekolah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap mutu lulusan. Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung integritas sekolah terhadap mutu lulusan melalui mutu proses adalah sebesar  $(0,222) \times (0,602) = 0,137 = 13,7\%$  Sehingga total pengaruh adalah sebesar 13,7%.

Hasil perhitungan uji sobel menggunakan Sobel Test diperoleh nilai *sobel tes statistic* (t hitung) sebesar 2,02656156 nilai tersebut lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,97. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu proses (M) memediasi secara penuh pengaruh integritas sekolah (X4) terhadap mutu lulusan (Y). Dengan demikian maka  $H_{13}$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh integritas sekolah terhadap mutu lulusan melalui mutu proses SMA Negeri di Kabupaten Kudus, Pati, dan Rembang **diterima**.

#### **SIMPULAN**

Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: (1) Tidak terdapat pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap mutu lulusan. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu lulusan sebesar 25,2%. Hal tersebut berarti semakin baik kepemimpinan kepala sekolah, maka mutu lulusan akan semakin baik. (3) Tidak terdapat pengaruh peran komite sekolah terhadap mutu lulusan. (4) Tidak terdapat pengaruh integritas sekolah terhadap mutu lulusan. (5) Terdapat pengaruh positif dan signifikan mutu proses terhadap mutu lulusan sebesar 36,42%. Dengan demikian semakin baik mutu proses pembelajaran maka mutu lulusan akan semakin baik. (6) Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembiayaan pendidikan terhadap mutu proses sebesar 10,11%. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi pembiayaan pendidikan maka mutu proses pembelajaran akan semakin baik. (7) Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu proses sebesar 19,62%. Dengan demikian semakin baik kepemimpinan kepala sekolah, maka mutu proses pembelajaran akan semakin baik. (8) Terdapat pengaruh positif dan signifikan peran komite sekolah terhadap mutu proses sebesar 7,78%. Dengan demikian semakin tinggi peran komite sekolah maka mutu proses pembelajaran akan semakin baik. (9) Terdapat pengaruh positif dan signifikan integritas sekolah terhadap mutu proses sebesar 4,93%, sehingga semakin baik integritas sekolah maka mutu proses pembelajaran akan semakin baik. (10) Mutu proses pembelajaran memediasi secara penuh pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap mutu lulusan dengan pengaruh tidak langsung sebesar 19,1%. (11) Mutu proses pembelajaran memediasi sebagian pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu lulusan. Pengaruh langsung kepemimpinan kepala sekolah sebesar 25,2%, dan pengaruh tidak langsung kepemimpinan kepala sekolah sebesar 26,7%, sehingga total pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu lulusan melalui mutu proses sebesar 51,9%. (12) Mutu proses pembelajaran tidak memediasi pengaruh peran komite sekolah terhadap mutu

lulusan. (13) Mutu proses pembelajaran memediasi secara penuh pengaruh integritas sekolah terhadap mutu lulusan dengan pengaruh tidak langsung sebesar 13,7%.

dan *Sosial Budaya*, Vol. 16, No. 2. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. 1990. *Beberapa Dimensi Mutu Pendidikan*. Fakultas Pasca Sarjana. Bandung: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Alawiyah, Faridah. 2015. Perubahan Kebijakan Ujian Nasional (Studi Pelaksanaan Ujian Nasional 2015). *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR R*. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Danim, Sudarwan dan Suparno. 2009. *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Matin. 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Ratnaningtyas, Kartika dan Rediana Setiyani. 2017. Efektifitas Komite Sekolah Sebagai Badan Pengawas Manajemen Keuangan Sekolah Pada SMA Negeri Se- Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*. Semarang: UNNES.
- Soetopo, Hendyat dan Wasty Soemanto. 1984. *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta : Bina Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin dan Mesiono. 2006. *Pendidikan Bermutu Unggul*. Bandung : Citapustaka Media.
- Tagela, Umbul. 2014. Kualitas Versi Deming, Juran, dan Crosby. *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah,*